

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Abdul Muid,¹ Rita Nur Halizah², Rosiyah³, Khoril Waro⁴

Abdul11muid@gmail.com,
ritanurhalizah96@gmail.com
Ocirosiyah@gmail.com
khoirilwaro39@gmail.com

Abstrak:

Kebijakan pendidikan adalah serangkaian keputusan strategis yang diambil oleh pihak terkait untuk membimbing, mengatur, dan mengembangkan sistem pendidikan demi pencapaian sasaran nasional. Elemen dasar dari kebijakan pendidikan mencakup pemahaman terhadap aspek filosofis, hukum, sosial, dan psikologis yang menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan. Teks ini membahas komponen-komponen penting dalam kebijakan pendidikan, seperti proses penyusunan, implementasi, dan penilaiannya, dengan memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan komunitas. Memahami konsep dasar ini sangat penting untuk memastikan efektivitas kebijakan serta kelanjutan pembangunan pendidikan yang bersifat inklusif dan adil.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan, elemen dasar, sistem pendidikan, penyusunan kebijakan, pembangunan pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada mulanya adalah tanggung jawab langsung dari masyarakat. Ketika pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri, pendidikan dianggap sebagai peristiwa sosial yang berkembang secara alami. Namun, seiring dengan meningkatnya tuntutan hidup dan kompleksitas masalah sosial, pendidikan yang hanya dikelola oleh masyarakat tanpa dukungan dari pihak berwenang sering kali tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan berfungsi secara terstruktur, merata, dan efektif.

Bahkan di negara-negara maju, di mana kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan sudah tinggi, intervensi pemerintah tetap diperlukan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah hanya urusan individu atau kelompok, tetapi merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin kualitas dan distribusi layanan pendidikan bagi semua warga negara. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kebijakan pendidikan yang komprehensif dan dapat menjawab berbagai tantangan zaman.⁵ Kebijakan pendidikan dapat dianggap sebagai

¹ Dosen Pascasarjana dan S1 Universitas Qomaruddin Bungah Gresik, Dosen S1 dan Pascasarjana STAI Arrosyid Surabaya, Anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, Kabid Pendidikan Dewan Masjid Kabupaten Gresik, Pengurus Aswaja Center PCNU Kabupaten Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Maziyyatul Ilmi Menganti Kabupaten Gresik, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Furqon NU Driyorejo Kabupaten Gresik, Wakil Ketua MWCNU Kecamatan Menganti, Anggota Pengurus Komnasdik Kabupaten Gresik.

² Mahasiswa Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

³ Mahasiswa Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

⁴ Mahasiswa Universitas Qomaruddin Bungah Gresik

⁵ Aulia Farkhan and others, 'Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.5 (2022), p. 1921, doi:10.35931/aq.v16i5.1354.

serangkaian keputusan strategis dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatur, mengarahkan, dan mengelola sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penetapan visi pendidikan, perencanaan strategis, pengembangan dan perancangan kurikulum, pembiayaan pendidikan, pengelolaan tenaga pengajar, pembangunan fasilitas, serta pemerataan akses dan mutu pendidikan. Semua elemen ini saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang dapat meningkatkan kecerdasan dan kehidupan bangsa.⁶

Selanjutnya, kebijakan dalam bidang pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan di sektor pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di suatu negara. Peristiwa yang terjadi dalam pendidikan sering kali mencerminkan pergerakan di sektor-sektor lain. Oleh karena itu, analisis terkait kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan hubungannya dengan kebijakan umum negara serta kondisi global yang memengaruhi arah dan tujuan pendidikan nasional.

Dengan memahami prinsip dasar kebijakan pendidikan, diharapkan para pemangku kepentingan dapat merancang dan melaksanakan kebijakan yang fleksibel, responsif, dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Prinsip ini menjadi dasar yang penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang siap menghadapi tantangan zaman dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas serta kompetitif.

Menurut Nichols, kebijakan adalah keputusan yang telah dipikirkan dengan cermat oleh para pengambil keputusan tingkat tinggi dan bukan merupakan aktivitas yang dilakukan secara berulang, terprogram, atau terkait dengan aturan yang ada. Sementara itu, Klein dan Murphy menjelaskan bahwa kebijakan terdiri dari sekumpulan tujuan, prinsip, dan peraturan yang berfungsi sebagai panduan bagi sebuah organisasi, sehingga mencakup seluruh arah organisasi.

Hough (1984) juga memberikan beberapa penjelasan mengenai arti kebijakan. Kebijakan dapat merujuk pada sekumpulan tujuan, rencana atau saran, program-program, keputusan, memberikan dampak tertentu, serta undang-undang atau regulasi yang berlaku. Duke dan Canady memperluas pemahaman mengenai kebijakan dengan delapan makna yang berbeda.

Pada tahun 2003, Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang dikenal sebagai Undang-Undang 20 Tahun 2003 telah disahkan. Penerapan hukum ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mencapai target pendidikannya melalui kebijakan di sektor pendidikan. Pencapaian target pendidikan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Kualitas pendidikan yang diperoleh dikelola sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa kebijakan pendidikan memelihara interaksi di antara elemen-elemen tersebut, yang berpengaruh pada proses manajemen sistem pendidikan. Dari perspektif kebijakan pendidikan, sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang fokus pada pencapaian tujuan pendidikan. Sebagai penyelenggara pendidikan, pemerintah diwajibkan untuk merancang

⁶ Nidia Suriani, Su'aidi, and Minnah El Widdah, 'Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1 (2024), pp. 33–41, doi:10.61104/ihsan.v2i1.93.

kebijakan pendidikan yang bersifat proaktif serta solusi dalam menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan

Berdasarkan uraian diatas, artikel ini membahas Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. Pembahasan tersebut diuraikan kedalam sub yang meliputi (1) Proses Kebijakan Pendidikan (2) Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai konsep dasar kebijakan pendidikan. Penelitian ini bersifat (library research), dimana data dikumpulkan melalui berbagai sumber literatur buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait kebijakan pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

PROSES KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Perumusan sebuah kebijakan lahir dari tahapan yang terstruktur dalam pembentukan kebijakan. Pembentukan kebijakan ini bisa diartikan sebagai urutan tindakan dari berbagai unsur yang terkait dalam tatanan sosial untuk mewujudkan cita-cita bersama. Alur pengambilan keputusan menimbang berbagai aspek dari luar, respons, tahapan perubahan, luaran, serta respons yang kembali kepada pihak yang membuat kebijakan. Sementara itu, pendidikan merupakan amanah yang wajib ditunaikan secara bersama oleh keluarga, warga, dan negara. Dengan kesadaran ini, perbaikan mutu pendidikan di Indonesia menjadi tugas kolektif antara keluarga, warga, dan pemerintah. Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, ada sejumlah peran yang bisa dilakukan oleh warga dan pemerintah daerah dalam menjalankan pendidikan.⁷

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak fundamental atas pendidikan. Oleh karena itu, semua orang berhak memperoleh pendidikan bermutu yang selaras dengan minat serta kemampuan mereka, tanpa memandang status sosial, keadaan ekonomi, asal daerah, ras, keyakinan, atau gender. Pendidikan inklusif memastikan siswa dengan disabilitas fisik atau mental, masalah keuangan dan sosial, atau tantangan wilayah, mendapatkan perhatian khusus melalui layanan pendidikan yang menjangkau mereka yang kerap terpinggirkan. Peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai melalui keterlibatan orang tua, fleksibilitas dalam manajemen sekolah, peningkatan profesionalisme pengajar, dan berbagai hal lain yang dapat menciptakan suasana yang mendukung. Distribusi pendidikan yang merata dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat, terutama dari mereka yang dapat dan peduli akan isu pendidikan. Hal ini berdampak pada pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah kabupaten dan kota untuk mengatur pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing daerah.

⁷ Farkhan and others, 'Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan'.

Sebagai suatu inovasi, pemahaman terkait konsep ini dalam konteks pendidikan di Indonesia sangatlah penting, mencakup bagaimana kebijakan pendukungnya, cara mensosialisasikan ide tersebut kepada pihak yang berkepentingan, seperti apa rancangan implementasinya, kondisi-kondisi apa yang harus dipenuhi demi kelancaran pelaksanaan, serta perlunya langkah antisipasi terhadap kemungkinan masalah yang akan muncul.⁸

Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan keterkaitan pendidikan dengan elemen sosial lainnya. Dengan demikian, sama halnya dengan analisis kebijakan di bidang lain, sifat kontekstual dan interdisipliner menjadi ciri khas analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan adalah upaya untuk mengumpulkan dan memproses informasi yang relevan menggunakan ilmu sosial terapan. Untuk mengatasi masalah pendidikan dalam konteks politik tertentu, metode penyelidikan dapat digunakan dan argumentasi yang beragam bisa dilakukan pada setiap tahapan proses kebijakan. Terdapat enam tahapan dalam proses kebijakan, yaitu:

1. Inisiasi

Pada tahap ini inisiasi dimulai ketika kemungkinan masalah ditemukan. Pada titik ini, berbagai solusi potensial untuk mengatasi, mengurangi beban, atau mengurangi efek masalah dapat dipertimbangkan secara tentatif dan awal. Meskipun perumusan masalah mungkin salah pada titik ini, masih perlu untuk menentukan apakah pemikiran lebih lanjut diperlukan, karena ini akan menghabiskan sumber daya seperti tenaga kerja, waktu, dan tenaga mental.

2. Estimasi

Pada tahap estimasi, berbagai risiko, biaya dan manfaat dari alternatif yang ada akan dipertimbangkan. Di fase ini, masalah tersebut ditekankan dengan cara ilmiah, empiris, dan proyektif untuk mengidentifikasi kemungkinan konsekuensi yang muncul akibat pemilihan kebijakan. Ada juga penekanan terhadap penilaian hasil yang diharapkan dengan berbagai metode teknis yang digunakan. Kebenaran yang bersifat normatif seringkali tidak dievaluasi secara menyeluruh karena adanya batasan dalam alat atau metode yang tersedia untuk itu.

3. Seleksi

Seleksi merujuk pada fakta bahwa akhirnya seseorang harus mengambil keputusan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menyusun masalah dan menilai alternatif yang ada, keputusan kebijakan harus diambil. Jarang sekali keputusan dibuat hanya berdasarkan perhitungan dan estimasi teknis, ada banyak faktor lain yang perlu diperhatikan, seperti pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan yang berbeda terkait informasi ideologis, moral, serta dasar untuk penetapan kebijakan. Sering kali, keputusan yang diambil adalah untuk tidak mengambil keputusan.

4. Implementasi

⁸ Mayya Mayya, 'Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26.1 (2019), pp. 108–17, doi:10.17509/jap.v26i1.19853.

Implementasi adalah pelaksanaan dari "pilihan" yang telah ditetapkan. Ini merupakan langkah pertama yang menguji kebenaran dari alternatif yang dipilih dengan situasi nyata. Sebelum pelaksanaan, tahapan yang diambil masih bersifat harapan, imajinasi, dan logika, sedangkan dalam implementasi, hal-hal tersebut dilakukan secara konkret, sambil memberikan umpan balik kepada pengambil keputusan.

5. Evaluasi

Evaluasi, dalam praktiknya, lebih bersifat retrospektif. Pada fase inisiasi dan estimasi, aktivitasnya bersifat antisipatif, sedangkan pada fase seleksi bersifat saat ini. Implementasi memberikan kesempatan untuk mengubah sesuatu yang bersifat potensial menjadi kenyataan, dan evaluasi menilai perbedaan di antara keduanya. Proses evaluasi berupaya menjawab pertanyaan mengenai kebijakan mana yang berhasil dan mana yang tidak, bagaimana kinerja dapat diukur, serta kriteria apa yang digunakan untuk pengukuran tersebut.

6. Terminasi

Terminasi berkaitan dengan penyesuaian kebijakan yang tidak lagi berfungsi, tidak diperlukan, berlebihan, atau tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Ini adalah fase yang belum banyak dibahas secara akademis. Proses kebijakan, dari inisiasi sampai terminasi, merupakan proses yang kompleks. Proses ini melibatkan perilaku individu, kelompok, dan masyarakat dalam konteks psikologis dan lingkungan yang beragam. Analisis tentang perilaku kebijakan adalah usaha untuk memahami perilaku tersebut, sekaligus mengkaji aspek-aspek yang dapat mendukung pencapaian hasil kebijakan dengan lebih baik. Hasil yang dimaksud sangat luas karena mencakup aspek interaksi dalam proses sosial yang hasilnya juga memiliki spektrum yang luas.

Dengan menjalani langkah-langkah tersebut, proses pembuatan kebijakan pendidikan akan lebih teratur, adil, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat. Ini sangat krusial untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas, seimbang, dan berkeadilan bagi semua warga negara.

Kebijakan pendidikan memainkan peran yang sangat krusial karena menjadi pondasi dalam menentukan arah dan strategi pengembangan pendidikan di suatu negara. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat menentukan prioritas, seperti peningkatan mutu guru, pemerataan akses pendidikan, pengembangan kurikulum, dan perbaikan fasilitas. Kebijakan yang baik akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan, sedangkan kebijakan yang kurang tepat dapat memperburuk ketidakadilan dan permasalahan yang ada.⁹

Dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, diperlukan analisis yang mendalam terhadap berbagai faktor, seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, serta kebutuhan siswa. Analisis ini umumnya didasarkan pada data hasil penelitian, studi akademis, dan laporan evaluasi dari kebijakan yang telah ada sebelumnya. Tanpa analisis yang cermat, kebijakan yang disusun berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

⁹ Oleh : Anesti and Rohma Wardani, 'Moh Rifki 3) , Nazhif Nafi' Dinulloh 4) , Indo Ahya Maulana 5) , Nur'Aini Zahro 6)', *Universitas Ahmad Dahlan*, 1.3 (2022), pp. 91–93 <<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3833/2556%0Ahttps://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3833>>.

Selain itu, kesuksesan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan. Pemangku kepentingan tersebut mencakup pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi mereka sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya bersifat dari atas ke bawah, tetapi juga mencerminkan harapan dan kondisi nyata yang dihadapi oleh komunitas pendidikan.

Dengan cara ini, proses pembuatan kebijakan pendidikan tidak hanya sekadar tindakan administratif, tetapi juga merupakan proses strategis yang membutuhkan pemikiran menyeluruh, partisipasi dari berbagai pihak, dan penilaian yang terus menerus. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat dan melahirkan generasi yang berkualitas serta memiliki daya saing yang tinggi.¹⁰

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Analisis kebijakan pendidikan adalah elemen yang sangat penting dalam proses perencanaan pendidikan ditingkat nasional. Aktivitas ini mencakup berbagai segi yang saling terkait dan berkontribusi untuk menyusun kebijakan yang berbasis data, relevan, dan fokus pada solusi dalam bidang pendidikan.

Ruang lingkup kebijakan pendidikan meliputi berbagai elemen yang secara komprehensif mengatur, mengarahkan, dan memberikan panduan terhadap pelaksanaan sistem pendidikan di suatu negara. Kebijakan pendidikan tidak hanya terbatas pada peraturan administratif, tetapi juga mencakup visi, taktik, dan keputusan penting yang diarahkan untuk mencapai sasaran pendidikan nasional. Wilayah ini sangat luas karena pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan berbagai sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Oleh sebab itu, pengembangan kebijakan pendidikan perlu dilakukan dengan cara yang komprehensif, menyeluruh, dan melibatkan partisipasi. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung kemajuan negara, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas.

Salah satu aspek utama dari analisis kebijakan pendidikan adalah pengumpulan informasi statistik terkait pendidikan. Statistik ini termasuk total peserta didik, jumlah guru, banyaknya sekolah, angka partisipasi pendidikan, rasio guru terhadap siswa, tingkat kelulusan, serta indikator lain yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Tanpa informasi yang tepat dan terkini, pengarah kebijakan pendidikan akan sangat sulit dilakukan.¹¹

Selanjutnya, pengembangan kurikulum juga menjadi bagian penting dalam kegiatan analisis kebijakan. Kurikulum yang baik harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan di pasar kerja. Oleh karena itu, proses pengembangan

¹⁰ Intan Syavutri and others, '2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 2.11 (2024), pp. 903–09.

¹¹ Dedi Susanto, Su'aidi, and Minnah El Widdah, 'Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam', *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2023), pp. 96–104, doi:10.61104/ihsan.v1i1.106.

kurikulum harus melalui analisis yang mempertimbangkan hasil penelitian, evaluasi pembelajaran, dan input dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Aspek lain yang dianalisis dalam kebijakan pendidikan adalah sistem pengujian. Ini mencakup tata cara ujian nasional, penilaian kompetensi, hingga metode penilaian yang digunakan di sekolah-sekolah. Penilaian terhadap sistem pengujian sangat penting untuk memastikan adanya keadilan, objektivitas, dan efisiensi dalam menilai hasil belajar siswa.

Selain itu, penelitian mengenai pendidikan dan budaya juga merupakan bagian penting dalam analisis kebijakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah strategis, mengevaluasi program yang ada, serta merumuskan metode baru untuk pengembangan sistem pendidikan. Penelitian yang berkualitas akan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai landasan untuk pertimbangan dalam pembentukan kebijakan.

Di era yang dipenuhi teknologi, teknologi komunikasi dalam pendidikan menjadi elemen penting dalam analisis kebijakan. Penggunaan teknologi seperti platform pembelajaran digital, sistem informasi manajemen pendidikan, dan media komunikasi antar pemangku kepentingan perlu dianalisis dengan seksama agar mampu meningkatkan efektivitas pendidikan dan memperluas akses belajar.

Poin keenam, yaitu pengembangan analisis kebijakan pendidikan dan budaya, adalah puncak dari semua aktivitas sebelumnya. Pada tahap ini, dirumuskan berbagai kebijakan yang bersifat jangka pendek, menengah, serta panjang. Analisis ini berfungsi untuk memberikan masukan kepada para pengambil keputusan dalam merancang kebijakan strategis pendidikan yang dapat merespond dengan baik terhadap isu-isu dan tantangan yang berkembang.

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Badan Penelitian dan Pengembangan, yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki peranan yang signifikan dalam melakukan analisis serta merumuskan bahan kebijakan pendidikan. Balitbang bertugas untuk mengidentifikasi isu-isu penting di dunia pendidikan, menganalisis data dan informasi yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kajian akademis dan lapangan.

Tujuan utama dari peran ini adalah untuk mendukung pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, dalam menyiapkan dan menyusun kebijakan yang relevan dan dapat diterapkan. Dengan pendekatan berbasis bukti, diharapkan pemerintah dapat segera dan tepat menjawab perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi dunia pendidikan.

Proyek Perencanaan dan Kebijakan Pendidikan (EPP) dan Peran USAID Sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan pendidikan, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan USAID melalui Proyek Perencanaan dan Kebijakan Pendidikan. Proyek ini resmi dimulai pada bulan Juli 1984 dengan tujuan utama untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia melalui penyusunan kebijakan yang lebih efektif.

Proyek EPP mengutamakan pentingnya penggunaan data yang tepat dan cara analisis yang sesuai dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Melalui inisiatif ini, berbagai jenis pelatihan, lokakarya, dan kerja sama antar unit di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (saat

itu Depdikbud) diintensifkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta sistem informasi.

Dampak dan Kelanjutan Proyek EPP Sejak proyek EPP dilaksanakan, langkah-langkah sistematis telah diambil untuk memahami permasalahan pendidikan dengan lebih mendalam. Hasil dari penelusuran ini menjadi dasar utama untuk pelaksanaan analisis kebijakan yang lebih terarah. Dengan adanya kerja sama antar unit di Depdikbud, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terintegrasi dan strategis.¹²

Salah satu pencapaian nyata dari proyek ini adalah tersusunnya rekomendasi kebijakan tahunan bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta pembuatan dokumen untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Rekomendasi tersebut menjadi acuan penting dalam penentuan prioritas kebijakan pendidikan dan pengalokasian sumber daya nasional dengan lebih efisien dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Proses pembuatan kebijakan pendidikan merupakan langkah strategis dan kompleks yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari inisiasi hingga terminasi. Setiap tahapan memerlukan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kebutuhan nyata masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban bersama orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat adil, relevan, dan efektif.

Kebijakan pendidikan yang baik harus berbasis data dan kajian ilmiah, serta peka terhadap perubahan dan tantangan zaman. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Melalui kebijakan yang tepat, diharapkan pendidikan di Indonesia mampu melahirkan generasi unggul, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi positif bagi pembangunan bangsa.

¹² mohamad imron Rosyid, 'Dampak Implementasi Kebijakan Yayasan Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Pembelajaran', *JURNAL MADINASIKHA Manajemen Pendidikan ...*, 1.1 (2019), pp. 18–25.

REFERENSI

- Anesti, Oleh :, and Rohma Wardani, ‘Moh Rifki 3) , Nazhif Nafi’ Dinulloh 4) , Indo Ahya Maulana 5) , Nur’Aini Zahro 6)’, *Universitas Ahmad Dahlan*, 1.3 (2022), pp. 91–93
<<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3833/2556%0Ahttps://doi.org/10.37081/ed.v10i3.3833>>
- Farkhan, Aulia, and others, ‘Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.5 (2022), p. 1921, doi:10.35931/aq.v16i5.1354
- Mayya, Mayya, ‘Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar’, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26.1 (2019), pp. 108–17, doi:10.17509/jap.v26i1.19853
- Rosyid, mohamad imron, ‘Dampak Implementasi Kebijakan Yayasan Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektivitas Pembelajaran’, *JURNAL MADINASIKA Manajemen Pendidikan ...*, 1.1 (2019), pp. 18–25
- Suriani, Nidia, Su’aidi, and Minnah El Widdah, ‘Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam’, *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2.1 (2024), pp. 33–41, doi:10.61104/ihsan.v2i1.93
- Susanto, Dedi, Su’aidi, and Minnah El Widdah, ‘Konsep Dasar Analisis Kebijakan Pendidikan Islam’, *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 1.1 (2023), pp. 96–104, doi:10.61104/ihsan.v1i1.106
- Syavitri, Intan, and others, ‘2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin’, 2.11 (2024), pp. 903–09